BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan internal di pemerintahan adalah proses pengendalian yang dilakukan oleh unit atau lembaga khusus untuk memastikan bahwa kegiatan, program, dan kebijakan pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal berperan penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*) dan mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintah, maka pengawasan internal membantu memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintah dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengawasan internal dirancang untuk mendeteksi potensi kecurangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebelum masalah tersebut berkembang lebih jauh. Dengan adanya pengawasan internal, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya seperti anggaran, waktu dan tenaga digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan internal memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintah sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Di Indonesia pada saat ini terdapat beberapa lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dalam mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu KPK, BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal pada masing-masing Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi tersebut di atas berupa pengawasan extern dan intern pemerintah, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas an ruang lingkup kerja masing-masing. Menurut Peraturan Menteri

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/220/M.PAN/7/2008, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yaitu BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat lembaga pemerintah Non Departemen, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian internal di pemerintahan. Kompetensi auditor, sebagai bagian dari APIP, sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan kualitas tata kelola pemerintahan. Kompetensi auditor ikut menentukan peningkatan efektivitas pengawasan, artinya auditor yang kompeten dapat mengidentifikasi area berisiko tinggi dan fokus pada pengawasan yang relevan. Dengan keterampilan analitis yang kuat, auditor dapat mendeteksi penyimpangan lebih cepat dan akurat. Pengetahuan mendalam dari seorang auditor dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif bagi unit yang diawasi. Rekomendasi yang tepat membantu perbaikan sistem dan proses di pemerintahan. Dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas, maka auditor yang memiliki kompetensi, berkontribusi pada laporan pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengawasan yang kredibel meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Auditor yang terampil menyelesaikan tugas pengawasan dengan efisien, menggunakan sumber yang tersedia secara optimal, termasuk penguasaan teknologi dan alat audit modern mempercepat proses audit.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kompetensi yang paling berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam mengidentifikasi penyimpangan meliputi beberapa aspek utama, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Berikut ini adalah kompetensi-kompetensi yang paling krusial:

1. Kompetensi Teknis (Hard Skills)
    a. Pengetahuan Akuntansi dan Audit: Pemahaman mendalam tentang prinsip akuntansi, standar audit (seperti ISA atau SPAP), dan peraturan perpajakan sangat penting.
    b. Kemampuan Analisis dan Evaluasi: Mampu menganalisis laporan keuangan, data transaksi, dan sistem internal untuk mendeteksi ketidakwajaran atau indikasi penyimpangan.
    c. Pemahaman atas Sistem Pengendalian Internal: Mengetahui bagaimana sistem pengendalian bekerja untuk mengenali kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk kecurangan.
    d. Penguasaan Teknologi Audit: Kemampuan menggunakan software audit atau alat bantu digital (seperti ACL, IDEA, atau Excel) untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar.
2. Kompetensi Non-Teknis (Soft Skills)
    a. Skeptisisme Profesional: Sikap hati-hati dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang diberikan, sehingga auditor tetap kritis dalam menilai bukti.
    b. Kemampuan Komunikasi: Keterampilan dalam mengajukan pertanyaan, melakukan wawancara, dan menyusun laporan audit dengan jelas dan logis.

tika dan Integritas: Memiliki moral dan etika kerja tinggi yang membuat uditor tidak mudah diintervensi atau dikompromikan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

d. Manajemen Waktu dan Tekanan: Kemampuan untuk bekerja secara efisien dan tetap objektif dalam tenggat waktu yang ketat atau kondisi yang penuh tekanan.
e. Kecerdasan Emosional: Mampu memahami dan mengelola emosi sendiri dan orang lain, penting saat menghadapi pihak yang mungkin terlibat dalam penyimpangan.

3. Pengalaman dan Profesionalisme
   a. Jam Terbang: Auditor dengan pengalaman tinggi cenderung lebih cepat mengenali pola-pola kecurangan atau ketidaksesuaian.
   b. Sertifikasi Profesional: Seperti CPA, CFE (Certified Fraud Examiner), atau CIA yang menunjukkan kompetensi profesional secara internasional.

Kompetensi teknis auditor sangat penting dan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengidentifikasi penyimpangan. Kompetensi teknis, artinya auditor harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), standar audit, dan pedoman yang relevan. Kompetensi ini membantu mereka dalam memahami laporan keuangan dan mendeteksi ketidaksesuaian. Selain itu kemampuan analisis data juga diperlukan, artinya auditor perlu memahami alat dan teknik analisis data, seperti analisis rasio, tren, dan outlier, untuk mengidentifikasi pola mencurigakan atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Kemampuan IT dan Forensik**,** auditor dituntut memiliki pengetahuan tentang sistem informasi dan audit forensik sangat penting dalam era digital untuk mendeteksi penyimpangan yang tersembunyi dalam sistem berbasis teknologi.

Mengutip dari laporan *Institute of Internal Auditors* (2020), terdapat
ı tantangan dari aspek kompetensi yang sering dihadapi oleh auditor
ам meningkatkan kinerjanya antara lain:
ıgnya Pelatihan dan Sertifikasi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kurangnya pelatihan teknis untuk auditor dan banyak auditor yang belum memiliki sertifikasi profesional seperti Certified Internal Auditor (CIA) atau sertifikasi lain yang relevan.

b. Terbatasnya Akses Teknologi

Minimnya dukungan teknologi yang canggih untuk membantu proses pengawasan.

c. Beban Kerja yang Tinggi

Auditor sering menghadapi beban kerja yang besar dengan sumber daya manusia yang terbatas.

d. Resistensi dari Pihak yang Diawasi

Terkadang auditor menghadapi kesulitan dalam mengakses data atau informasi dari pihak yang diawasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan sistem pengendalian intern. Penerapan sistem pengendalian intern dimaksudkan agar instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif, efisien dan ekonomis, dengan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan, tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tetap menjaga keamanan aset yang dimiliki. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka dipandang perlu meningkatkan kapabilitas APIP instansi pemerintah sehingga dapat menjalankan perannya secara optimal untuk mewujudkan penerapan SPIP yang memadai di lingkungan instansi pemerintah masing-masing (Sumanti, 2020).

Sistem Pengendalian Internal (SPI) memainkan peran kunci dalam h terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan menyediakan kerja untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan secara ın, efisien dan sesuai aturan. Dalam Upaya pencegahan dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menangani kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan lainnya, maka peran Sistem Pengendalian Internal sangat penting, khususnya dalam upaya pencegahan melalui pengawasan dan pemantauan, dalam hal ini SPI perlu melakukan Pemisahan Tugas (Segregation of Duties), dimana SPI memastikan bahwa tidak ada satu individu yang memiliki kendali penuh atas semua aspek suatu transaksi, sehingga meminimalkan peluang untuk penyalahgunaan wewenang. Pengawasan berkala sangat diperlukan, adanya audit internal dan evaluasi rutin membantu mendeteksi serta mencegah potensi praktik KKN sebelum terjadi. SPI berperan dalam pengelolaan risiko, artinya Upaya Identifikasi dan Mitigasi Risiko, dimana SPI membantu organisasi mengidentifikasi area rawan risiko, seperti proses pengadaan atau distribusi anggaran, yang sering menjadi titik rawan korupsi. Selain itu Sistem Alarm Dini (*Early Warning System*), dimana SPI memungkinkan penerapan mekanisme deteksi dini untuk menyoroti aktivitas mencurigakan atau tidak biasa. Prinsipnya, SPI bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga pondasi bagi organisasi untuk menciptakan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN. Penerapan SPI yang konsisten dan komprehensif dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap organisasi, terutama di sektor pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, terdapat konsep pengawasan intern yang mencakup kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Sistem Pengendalian Internal yang baik berperan sebagai landasan bagi aparat pengawasan internal untuk bekerja lebih efektif,

an strategis. Sebaliknya, SPI yang kurang baik menjadi hambatan yang , yang tidak hanya mempersulit tugas pengawasan tetapi juga ngi dampaknya terhadap peningkatan tata kelola organisasi. Oleh

Optimized using
trial version
www.balesio.com

karena itu, memperkuat SPI di setiap unit kerja sangat penting untuk memastikan kinerja aparat pengawasan internal yang optimal. Menurut Siregar (2020) Auditor internal pada unit kerja dengan SPI yang lemah lebih sering menghadapi hambatan dalam pengumpulan data dan pelaksanaan rekomendasi.

Untuk menciptakan akuntabilitas laporan keuangan dan pertanggungjawabannya tidak terlepas dari fungsi internal audit. Fungsi ini membantu mengawasi jalannya organisasi untuk memastikan akuntabilitas dan integritas, serta mengawasi pelaksanaan program sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *stake holder* dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Fungsi internal audit diharapkan memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi agar dapat memberikan nilai tambah (*value added*) agar efisiensi, ekonomi dan efektivitas dapat tercapai. Seperti yang dijelaskan oleh Sawyer (2003:7) bahwa Auditor Internal membantu organisasi dalam pencapaian tujuan dengan pendekatan sistematis dan inter-disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki keefektivan manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola *(governance*). Agar dapat memberi nilai tambah, kinerja audit internal diukur dari tingkat efektivitasnya. Salah satu ukuran efektivitas auditing adalah jika temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu organisasi dalam pengelolaan keuangan secara efisien, efektif dan ekonomis. Namun ukuran efektivitas auditing masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu beberapa peneliti menggunakan berbagai pendekatan untuk mengeksplorasi efektivitas auditing atau audit internal. Misalnya Dellai (2015) yang mengadopsi Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal (ISPPIA) sebagai pedoman untuk menentukan efektivitas auditing. (Saidu Badara & Zabedah

013); (Endaya & Hanefah, 2016); (Mihret & Yismaw, 2007); (Arena &

2009); yang mengembangkan model mereka sendiri untuk memeriksa

s auditing. Auditor internal harus memiliki kapabilitas yang cukup untuk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mewujudkan peran mereka secara efektif dalam lingkup tata kelola sektor publik. Untuk dapat berperan secara efektif, penting bagi APIP untuk terus meningkatkan kapabilitas organisasinya sebagai salah satu kriteria bagi tata kelola yang baik.

Menurut hasil Pembinaan Kapabilitas APIP oleh BPKP bahwa Pembinaan Kapabilitas APIP dengan menggunakan Aplikasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP merupakan inovasi yang bertujuan untuk mewujudkan peran strategis APIP dengan menekankan pada hasil, yakni mendorong pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan peringatan dini melalui manajemen risiko, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Sistem ini telah digunakan pada 542 APIP Daerah (100%) (Maryani, 2017).

Capaian kinerja dengan indikator persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 88,88% yaitu 72,87% dari target 81,99%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan jumlah K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 (delivered) sebesar 454 APIP atau 72,8% dari total APIP sebesar 623. Artinya sebanyak 454 APIP tersebut telah menerapkan praktik professional, Dimana audit internal telah dilakukan secara seragam dan selaras dengan standar. APIP juga telah mampu menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu program/kegiatan. Selain itu APIP mampu memberikan konsultasi terkait tata Kelola, management risiko dan pengendalian intern. Kapabilitas APIP pada Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah kemampuan yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan (Hului, 2023).

Peningkatan efektivitas pengawasan intern APIP menuntut adanya tan kapabilitas APIP itu sendiri. APIP dengan tata kelola yang baik atau harapkan dapat mendorong dan meningkatkan efektivitas tata kelola si kementerian, lembaga, maupun daerah secara keseluruhan (Tommy,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2016). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2009 IIARF mengusulkan enam elemen fundamental yang diperlukan agar pengawasan intern di sektor publik dapat berperan secara efektif melalui suatu kerangka kerja yang disebut *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). Model ini mampu menggambarkan jalur peningkatan kapabilitas pengawasan intern dari kondisi yang kurang kuat menuju kondisi kuat dan efektif yang dengan adanya pemeringkatan kapabilitas mulai dari level 1 (initial), level 2 (*structured*), level 3 (*delivered*), level 4 (*managed*), dan level 5 (*Institutionalized*). IACM diadopsi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menilai dan meningkatkan kapabilitas APIP di Indonesia (Sella, 2019).

Kompetensi APIP dapat dilihat dari level kapabilitas APIP itu sendiri. Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan semakin baik pula kinerja APIP dalam menjalankan perannya sebagai auditor. Berdasarkan Laporan Kinerja BPKP 2023, dari 34 Pemerintah Provinsi, baru 32 APIP yang mencapai tingkat kapabilitas APIP level 3. Dengan demikian, masih ada 2 Pemerintah Provinsi yang masih memiliki kapabilitas APIP di bawah level 3 (BPKP, 2023).

Persentase APIP K/L/P dengan kapabilitas ≥ level 3 diukur dari jumlah APIP K/L/P dengan kapabilitas ≥ level 3 dibandingkan dengan jumlah total APIP K/L/P. Ringkasan kinerja kapabilitas APIP K/L/P tahun 2023 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.1 Ringkasan Kinerja Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Mitra Kerja	Jumlah APIP K/L/Pemda Mitra	Jumlah APIP K/L dengan Kapabilitas			
		K/L	Level-2	≥ Level-3	% ≥ Level-3
K/L	81	4	18	59	**72,83**
Pemprov	34	0	2	32	**94,11**
Pemkab/Kota	508	27	118	363	**71,45**
ıh	623	31	138	454	**72,87**
:ase	**100**	**4,98**	**22,15**	**72,87**	

.aporan Kinerja BPKP, 2023:89

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Capaian kapabilitas APIP Level 3 pada tahun 2023 adalah sebanyak 454 K/L/P, yang terdiri dari 59 K/L, 32 pemerintah provinsi, dan 363 pemerintah kabupaten/kota. Realisasi kapabilitas APIP Level 3 pada tahun 2023 ini meningkat 109 K/L/P dibandingkan dengan realisasi triwulan III tahun 2023 dan meningkat 113 K/L/P dibandingkan realisasi tahun 2022. (BPKP, 2023).

Rincian perbandingan capaian Kapabilitas APIP tahun 2022 dan tahun 2023 terlihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Perbandingan Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2022 dan 2023

No	Level Kapabilitas APIP	Jumlah K/L/ Pemda Mitra			
		Tahun 2022	Tahun 2023	+/(-)	%
1	Level 3	341	454	113	**18,13**
2	Level 2	238	38	(100)	**(16,05)**
3	Level ≤ 1	44	31	(13)	**(2,08)**
	Jumlah	**623**	**623**		

Sumber: Laporan Kinerja BPKP, 2023.

Realisasi K/L/P dengan kapabilitas APIP Level 3 pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 113 K/L/P atau sebesar 33,13% dibandingkan tahun 2022 dan jika dibandingkan dengan populasi APIP level 3 meningkat sebesar 18,13%. Sementara, kapabilitas APIP pada Level 2 berkurang sebanyak 100 K/L/Pemda dan Level < 1 sebanyak 13 K/L/P, hal ini disebabkan karena kenaikan level dibandingkan tahun 2022 (Laporan Kinerja BPKP, 2023).

Penyebab tidak tercapainya target Kapabilitas APIP K/L/P > Level 3 tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1) Metode pembinaan kepada APIP K/L/P masih menggunakan pendekatan generalisasi. Pengukuran yang saat ini dilakukan cenderung menganggap setiap APIP memiliki kondisi dan permasalahan yang sama. Pembinaan juga ın mempertimbangkan ekspektasi pimpinan instansi maupun ɛholders utama APIP tersebut;

Optimized using trial version www.balesio.com

2) Metode penilaian Kapabilitas APIP masih berbasis pengukuran melalui kegiatan penilaian mandiri, evaluasi penilaian mandiri, dan monitoring tindak lanjut AoI; dan
3) Variabel penilaian belum selaras dengan indikator. Penilaian Kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen, yaitu enabler, peran & layanan, dan result. Sementara indikator kinerja yang digunakan hanya capaian level maturitas.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 oleh BPKP, kinerja APIP Provinsi Sulawesi Barat masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan meskipun sudah menunjukkan capaian pada Level 3 (terdefinisi). Skor akhir evaluasi SPIP menurun dari hasil penilaian mandiri 3,980 menjadi 3,205 setelah dilakukan penjaminan kualitas, dan dua indikator penting lainnya yaitu Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) juga mengalami penurunan masing-masing dari 3,750 menjadi 2,878 dan dari 4,000 menjadi 2,850.

Beberapa permasalahan utama yang menjadi catatan terhadap kinerja APIP dalam mendukung efektivitas SPIP meliputi:

1. Kelemahan dalam Perencanaan dan Penetapan Sasaran

   Banyak sasaran strategis pemerintah daerah dan OPD belum berorientasi hasil serta tidak memiliki indikator yang memadai dan relevan. Kualitas strategi pencapaian sasaran juga masih lemah dari tingkat program hingga subkegiatan.

2. Manajemen Risiko yang Belum Optimal

   Proses manajemen risiko belum berjalan secara konsisten dan belum ɛgrasi ke dalam proses perencanaan strategis dan operasional. Struktur ɯga belum terbentuk dengan baik di tingkat Pemda dan OPD, serta ı ada asesmen risiko korupsi secara menyeluruh.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Lemah

   Hal ini disebabkan antara lain karena belum tersedianya sistem antikorupsi yang lengkap dan belum dilakukan asesmen serta mitigasi risiko korupsi secara sistematis.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini mengindikasikan bahwa peran APIP sebagai garda terdepan dalam penguatan sistem pengendalian intern pemerintah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kapabilitas, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, dan dukungan terhadap sistem pencegahan korupsi. Rekomendasi strategis diberikan BPKP untuk memperkuat struktur MR, memperbaiki kualitas perencanaan, dan meningkatkan peran APIP dalam mendampingi proses pengambilan keputusan dan pengawasan di semua lini pemerintahan daerah

Kompetensi APIP dan audit internal merupakan aspek kritikal dalam memastikan efektivitas pengawasan dan pengendalian dalam organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam penelitian Ikins (2011), menunjukkan bahwa kapabilitas APIP yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian dalam sektor publik. Kualitas audit internal yang tinggi berkontribusi pada pengelolaan risiko yang lebih baik dan transparansi operasional. Dalam hal peningkatan kualitas audit internal, maka Inspektorat perlu memberikan pelatihan berkelanjutan, meningkatkan akses auditor ke sumber daya, memperkuat budaya transparansi, dan memastikan dukungan penuh dari manajemen. Dengan langkah-langkah ini, auditor internal dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola organisasi yang baik.

gsi auditing yang efektif bertujuan untuk mencapai tujuan utamanya, liri dari menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi 2018). Efektivitas auditing yang diharapkan memiliki faktor yang

berkontribusi seperti kompetensi dari tim internal audit, independensi dari internal audit, dukungan manajemen, dan kualitas audit internal (Rudhani, Vokshi dan Hashani, 2017). Efektfiifitas auditing atau audit internal berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil audit. Tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil audit Inspektorat sangat bergantung pada kualitas hasil kerja auditor, relevansi rekomendasi, serta pendekatan komunikasi yang digunakan. Untuk meningkatkan kepuasan, Inspektorat perlu memperkuat kompetensi auditor, memastikan transparansi, dan menyediakan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara praktis.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana awal. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah serta diharapkan independen dari pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain (Rahadhitya dan Darsono, 2015).

Penelitian Susanto dan Hidayat (2022) pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di kapabilitas level 3 memerlukan perbaikan berupa pemenuhan kebutuhan jumlah auditor madya, penyesuaian laporan atas Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, perubahan Pedoman Pola Hubungan Kerja di Bidang Pengawasan, serta perencanaan kegiatan konsultansi. Adopsi *IA-CM* pada Unit Pengawasan Internal Ombudsman telah terbukti membawa perubahan signifikan yang mendorong peningkatan mencapai level 3 (Hidayat & Susanto, 2022). Ombudsman menjalin kerja sama dengan tansi lain, mengeluarkan *Internal Audit Charter* dengan akses penuh am melakukan pengawasan melaksanakan kegiatan sesuai Standar dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kode Etik melalui pengembangan kompetensi, melaksanakan kegiatan audit kinerja, serta mengikuti proses telaah sejawat.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Hasanah (2022) dengan judul "Analisis Kapabilitas APIP Dengan Perspektif *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyumas)", menunjukkan hasil bahwa level Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banyumas masih berada pada level 1 (Initial) yang berarti masih banyaknya hambatan dalam Upaya memenuhi kapabilitas APIP sesuai dengan perspektif *Internal Audit Capability Model* (IA-CM).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam menjalankan fungsinya, kinerja APIP dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kompetensi auditor, efektivitas audit, dan sistem pengendalian internal (SPI). Secara teoritis, peningkatan pada faktor-faktor tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja APIP secara langsung dan signifikan. Namun dalam praktiknya, hubungan antara variabel-variabel tersebut tidak selalu menunjukkan pola linier.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi auditor belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja APIP. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja, seperti keterbatasan anggaran, independensi auditor, budaya organisasi, serta lemahnya tindak lanjut atas hasil audit. Penelitian Suhardjanto dan Nugrahanti (2012) mengungkapkan bahwa meskipun auditor memiliki kompetensi teknis yang baik, keterbatasan kapasitas organisasi dapat menghambat kontribusi

nsi tersebut terhadap peningkatan kinerja pengawasan.

nikian pula, efektivitas pelaksanaan audit internal belum tentu

ak optimal terhadap kinerja APIP jika tidak didukung oleh sistem

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengendalian internal yang memadai. Sari dan Haryono (2020) menyatakan bahwa efektivitas audit hanya akan memberikan hasil nyata jika didukung oleh lingkungan pengendalian dan dukungan manajemen yang kuat. Dalam konteks ini, SPI berperan sebagai variabel mediasi yang penting dalam menghubungkan input pengawasan dengan hasil kinerjanya.

Tidak hanya itu, faktor budaya organisasi, kompleksitas tugas, dan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan juga memiliki pengaruh signifikan. Putri (2018) menyoroti pentingnya nilai-nilai organisasi yang mendukung integritas dan profesionalisme. Tanpa budaya organisasi yang sehat, kinerja APIP tidak akan meningkat secara signifikan meskipun audit telah dilakukan secara efektif. Fitriana (2021) juga menunjukkan bahwa kompleksitas entitas yang diawasi dapat membatasi ruang gerak APIP dalam menerapkan hasil audit secara optimal.

Ketidaktercapaian kinerja APIP secara maksimal meskipun telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas juga tercermin dari data tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) yang belum optimal. Berdasarkan Laporan Evaluasi BPKP (2022), masih terdapat kendala dalam pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan, yang pada akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat keberhasilan pengawasan itu sendiri.

Fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara kompetensi, efektivitas audit, sistim pengendalian intern, dan kinerja APIP tidak bersifat sederhana atau linier. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis bagaimana ketiga faktor tersebut saling berinteraksi, serta sejauh mana SPI dapat memediasi pengaruh kompetensi dan s audit terhadap kinerja APIP. Penelitian ini diharapkan dapat kan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan fungsi pengawasan emerintah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, pada praktiknya, peningkatan kompetensi auditor dan efektivitas pelaksanaan audit belum selalu diikuti dengan peningkatan kinerja APIP. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang berdampak pada rendahnya keberhasilan pengawasan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut.

Salah satu faktor penting yang berpotensi menjadi penghubung antara input pengawasan dan kinerja APIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI). SPI yang kuat dapat memastikan bahwa hasil audit tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara sistematis oleh manajemen. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menguji peran mediasi SPI dalam hubungan antara kompetensi auditor dan efektivitas audit terhadap kinerja APIP, guna memberikan masukan empiris dalam upaya penguatan pengawasan internal dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya, peningkatan kompetensi auditor maupun efektivitas audit belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kinerja pengawasan yang optimal. Laporan evaluasi BPKP dan hasil pengawasan internal menunjukkan masih adanya kendala dalam implementasi rekomendasi audit, yang berimplikasi pada rendahnya keberhasilan fungsi pengawasan secara menyeluruh.

am konteks tersebut, Sistem Pengendalian Intern (SPI) diyakini menjadi
ısial yang memediasi hubungan antara kompetensi dan efektivitas audit
kinerja APIP. SPI yang berjalan efektif dapat menjamin bahwa hasil

audit diinternalisasi dan ditindaklanjuti oleh manajemen secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menguji secara empiris bagaimana peran SPI dapat memperkuat pengaruh kompetensi dan efektivitas audit terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kapabilitas APIP di daerah.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, kompetensi auditor dan efektivitas pelaksanaan audit menjadi faktor utama yang harus diperkuat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keduanya belum selalu mampu meningkatkan kinerja APIP secara langsung. Hasil evaluasi tindak lanjut atas temuan audit yang belum optimal mengindikasikan perlunya peran faktor lain yang dapat menjembatani pengaruh kompetensi dan efektivitas audit terhadap kinerja, yaitu Sistem Pengendalian Internal (SPI).

SPI dipandang relevan sebagai variabel mediasi karena berperan sebagai sistem yang mengawal pelaksanaan audit agar berjalan sesuai standar, sekaligus memastikan bahwa hasil audit ditindaklanjuti secara sistematis. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan teori agensi yang menempatkan SPI sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan konflik kepentingan dan risiko moral hazard dalam organisasi publik. Selain itu, temuan dari beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa SPI mampu menjembatani hubungan antara kompetensi sumber daya dan sistem kerja audit terhadap kinerja pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil SPI sebagai variabel untuk mengkaji secara komprehensif pengaruh kompetensi dan s audit terhadap kinerja APIP pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Inspektorat memiliki peran dan fungsi yang disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tetapi pada kenyataannya Inspektorat pemerintah daerah yang ada di Indonesia belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Faktanya bahwa pola pengawasan yang saat ini dilakukan oleh Inspektorat jauh dari efektif. Salah satu penyebabnya adalah kedudukan Inspektorat berada di bawah kepala daerah yang seharusnya masuk kedalam lingkup pengawasan. Inspektorat, sebagai pelaksana fungsi pengawasan, berada dibawah kendali kepala daerah, baik secara hierarki maupun administratif. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, terutama jika terdapat penyimpangan yang melibatkan kepala daerah atau kebijakan yang dikeluarkannya.

Tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, menurut analisa peneliti, adalah dari aspek alokasi anggaran dan tantangan geografis, mengingat bahwa secara keseluruhan kegiatan auditor itu sangat bergantung pada alokasi anggaran operasional dan sarana prasarana. Inspektorat sangat bergantung pada alokasi anggaran yang diberikan oleh kepala daerah. Hal ini berpotensi membatasi ruang gerak pengawasan, terutama jika alokasi anggaran tidak memadai. Selain itu APIP menghadapi kenyataan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur masih rendah di beberapa unit kerja pemerintah. Hal tersebut lebih disebabkan oleh minimnya pemahaman atau pelatihan atas aturan keuangan/pengadaan. Ada “budaya pembiaran” terhadap praktik yang tidak sesuai aturan. Kemudian Sanksi

atif tidak ditegakkan secara konsisten.

ıdisi Sulawesi Barat yang memiliki karakteristik geografis yang khas

daerah yang terdiri dari wilayah pegunungan, perbukitan, dan pesisir

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pantai ini, menciptakan tantangan yang signifikan terhadap efektivitas kinerja APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pada pemerintah daerah, akibatnya APIP menghadapi kesulitan dalam menjangkau unit kerja atau objek pengawasan yang berada di daerah terpencil, yang dapat menghambat pelaksanaan audit atau inspeksi lapangan secara langsung dan menyeluruh. Tantangan tersebut, berimbas pada biaya operasional pengawasan meningkat, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan menjadi lebih lama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja APIP. Variabel berpengaruh yang digunakan diantaranya kompetensi auditor dan efektifitas auditing melalui sistem pengendalian internal di lingkup Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian berangkat dari minimnya kajian terpadu antara Kompetensi, Efektivitas Audit, dan SPI sebagai Variabel Mediasi. Sebagian besar penelitian hanya mengkaji pengaruh kompetensi auditor langsung terhadap kinerja, atau hanya fokus pada efektivitas audit tanpa mempertimbangkan peran sistem pengendalian internal (SPI). Padahal, SPI berperan sebagai *enabler* yang menjembatani kualitas input (kompetensi, efektivitas audit) terhadap kinerja APIP. Kondisi kinerja APIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat belum banyak diteliti, padahal daerah ini memiliki tantangan tata kelola yang khas, terutama pasca desentralisasi dan tuntutan akuntabilitas publik yang meningkat.

Urgensi dari penelitian adalah untuk mendorong Peningkatan Kinerja APIP Secara Strategis. APIP sebagai *early warning system* harus bekerja optimal untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki penyimpangan. Penelitian ini embantu merumuskan strategi peningkatan kinerja berbasis bukti, menekankan bahwa peningkatan kompetensi perlu didukung sistem alian yang kuat. Kinerja APIP yang optimal akan berkontribusi langsung

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terhadap reformasi birokrasi dan penguatan sistem integritas di daerah. Penelitian ini relevan dengan upaya KPK, BPKP, dan Kemendagri dalam mendorong peran APIP sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Kajian tentang kinerja APIP penting untuk mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat, terutama dalam memperkuat peran Inspektorat sebagai pengawas internal. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pengawasan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak positif bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan garda terdepan dalam sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan APIP menjadi sangat vital dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik berjalan secara akuntabel, transparan, dan efisien. Dalam konteks reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peran APIP semakin strategis untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. APIP berperan penting dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan audit kinerja, audit kepatuhan, serta reviu laporan keuangan. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dan evaluasi atas sistem pengendalian intern (SPI) membantu memastikan bahwa setiap kegiatan dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Transparansi sebagai salah satu prinsip good governance dapat ditingkatkan melalui digitalisasi pengawasan, reviu atas proses perencanaan dan ggaran, serta publikasi ringkasan hasil pengawasan secara terbatas. Hal mberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengawasi ggaraan pemerintah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Efisiensi juga menjadi bagian penting dalam peran APIP melalui audit kinerja, rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta reviu atas belanja modal dan pengadaan. Langkah ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi pemborosan dan meningkatkan output pelayanan publik.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kinerja APIP dapat ditingkatkan melalui penguatan kompetensi, sistem pengendalian internal, serta dukungan kelembagaan. Tujuannya adalah memperkuat peran APIP dalam memastikan tercapainya akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Internal pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Apakah Efektifitas Auditing berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Internal pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ?
3. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kinerja Pengawasan Intern pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ?
4. Apakah Efektifitas Auditing berpengaruh terhadap Kinerja Pengawasan Intern pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pengawasan Intern pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat?
6. Apakah Kompetensi Auditor dimediasi Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

7. Apakah Efektifitas Auditing dimediasi Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Sistem Pengendalian Internal pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Efektifitas Auditing terhadap Sistem Pengendalian Internal pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kinerja Pengawasan Intern pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Efektifitas Auditing terhadap Kinerja Pengawasan Intern pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengawasan Intern pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Auditor dimediasi System Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
7. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Efektifitas Auditing dimediasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi

an praktis :

at Teoritis

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga pada literatur akademis khususnya manajemen keuangan daerah dan akuntansi. Temuan dari penelitian ini dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan teori di bidang manajemen keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana peningkatan kompetensi auditor dan efektivitas proses audit dapat secara langsung meningkatkan kinerja APIP. Dapat menjadi masukan bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat untuk merancang program pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif bagi auditor.

b. Peneliti

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian dibidang manajemen keuangan daerah dengan fokus pada peningkatan tata kelola keuangan dan pengawasan audit internal. Melalui hasil penelitian, peneliti dapat ikut berkontribusi langsung dalam pembangunan dan perbaikan proses tata kelola keuangan publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu rumusan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bab II Tinjauan Pustaka,

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian,

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

Bab IV Metode Penelitian,

Membahas variabel penelitian, definisi optimal yang dapat memberikan deskripsi tentang variabel-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian. jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel penelitian serta darimana data tersebut diperoleh, metode pengumpulan data dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, metode analisis yang berisi instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis.

Bab V Hasil Penelitian,

Mendeskripsikan obyek penelitian dan menyajikan data - data deskripsi hasil analisis stratistik yang telah dilakukan.

Bab VI Pembahasan,

Membahas hasil - hasil penelitian yang telah diteliti.

Bab VII Penutup,

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi berfokus pada hubungan antara prinsipal (pihak yang memberikan amanah, misalnya pemerintah atau masyarakat) dan agen (pihak yang melaksanakan tugas, seperti auditor internal atau APIP). Dalam konteks penelitian ini, APIP bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara akuntabel sesuai dengan kepentingan prinsipal. Kompetensi auditor dan efektivitas auditing menjadi faktor penting untuk mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal serta mencegah potensi konflik kepentingan.

Dalam konteks penelitian tentang kinerja APIP di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat:

1. Prinsipal

   Pemerintah dan masyarakat yang menginginkan pengelolaan anggaran publik dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efisien.

2. Agen

   Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

3. Masalah Keagenan:

   a. Potensi ketidaksesuaian tindakan APIP dengan harapan prinsipal karena keterbatasan kompetensi atau tidak efektifnya auditing.

   b. Risiko moral hazard jika auditor internal tidak bertindak independen atau dipengaruhi oleh pihak tertentu.

ɛm Pengendalian Internal sebagai Solusi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

SPI menjadi salah satu mekanisme untuk meminimalkan masalah keagenan dengan memastikan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja APIP. SPI membantu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas agen terhadap prinsipal.

Adapun penerapan Teori Agensi dalam Penelitian ini, dimana teori agensi menjelaskan bahwa:

1. Kompetensi auditor yang memadai dapat mengurangi risiko moral hazard dan adverse selection dalam proses auditing.
2. Efektivitas auditing memperkuat peran agen dalam memberikan laporan yang transparan kepada prinsipal.
3. Sistem Pengendalian Internal membantu menjaga keselarasan antara tindakan agen (APIP) dan kepentingan prinsipal (masyarakat dan pemerintah).

Dengan demikian, teori agensi menjadi dasar konseptual untuk memahami bagaimana hubungan antara kompetensi auditor, efektivitas auditing, dan sistem pengendalian internal dapat memengaruhi kinerja APIP sebagai agen dalam memenuhi harapan prinsipal.

2.1.2. Kompetensi Auditor

2.1.2.1. Pengertian

Kompetensi auditor merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh auditor untuk melakukan tugas audit secara efektif. Kompetensi ini mencakup pemahaman tentang prinsip dan standar akuntansi, kemampuan analitis, keterampilan komunikasi, dan pemahaman terhadap teknologi informasi yang relevan. Dalam melakukan proses audit, auditor diharuskan memiliki kompetensi yang memadai agar hasil audit kualitas yang tinggi. Setiap auditor harus berusaha keras agar tkan kompetensi tertinggi untuk memastikan kualitas layanan yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mereka berikan terhadap klien telah memenuhi profesionalitas sesuai dengan etika yang berlaku dalam Puspitasari (2019). Pengertian kompetensi auditor menurut Armawan & Wiratmaja (2020): “Kompetensi auditor adalah kemampuan seorang auditor untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya dalam melakukan proses audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan lebih teliti, cermat serta obyektif”. Adapun Nasra (2020) mendefinisikan kompetensi auditor sebagai: “kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar”, sedangkan, menurut Dewi (2016): “Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh auditor untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya”. Rai (2008:63) dalam Pintasari (2015) menyatakan bahwa agar seorang auditor berhasil dalam melaksanakan proses audit, ia harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan umum yang memadai, dan keahlian khusus dibidangnya. Mutu personal yang baik adalah :

1. Rasa ingin tahu
2. Berpikiran luas
3. Mampu menangani ketidakpastian
4. Mampu menerima beberapa termuan dapat bersifat subjektif
5. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah
6. Mampu bekerja sama dalam tim

De Angelo (1981) dalam Watkins (2004) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan ı pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk kapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada ensi yang dimiliki auditor tersebut. Ada banyak faktor yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

memengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang auditing, akuntansi, dan industri klien. Syarat pengauditan pada Standar Auditing, meliputi tiga hal, yaitu : (SA Seksi 150 SPAP, 2001):

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalamsikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya (kompetensinya) dengan cermat dan seksama.

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dibidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikanformal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2001). Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

2.1.2.2. Jenis-jenis auditor

Terdapat empat, jenis auditor yaitu :

1. Auditor Eksternal

Auditor Eksternal Auditor yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik

2. Auditor Pemerintah

r Pemerintah Auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan nstansi-instansi pemerintah

r Internal

Optimized using trial version www.balesio.com

Auditor Internal Auditor yng bekerja pada suatu perusahaan dan berstatus sebagai pegawai perusahaan tersebut bertugas membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja

4. Auditor Pendidik

Auditor Pendidik Auditor yang bekerja sebagai pendidik

2.1.2.3. Ranah Kompetensi Auditor

Ranah kompetensi auditor menurut Sukrisno Agoes (2013:163) meliputi tiga ranah yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi pada ranah kognitif.

   Kompetensi pada ranah kognitif memiliki arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada pengetahuan/knowledge seperti pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait.

2. Kompetensi pada ranah afektif

   Kompetensi pada ranah afektif memiliki arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada sikap dan perilaku etis termasuk kemampuan berkomunikasi.

3. Kompetensi pada ranah psikomotorik

   Kompetensi pada ranah psikomotrik memiliki arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada keterampilan teknis/fisik."

Pengembangan dari kompetensi pada ranah kognitif yaitu pengetahuan yang didapatkan oleh seorang auditor agar memiliki kompetensi yang tinggi, menurut Putri (2016) dengan melalui:

likan universitas formal untuk memasuki profesi.

mendapatkan gelar akuntan lulusan S1 akuntansi diharuskan lulus likan Profesi Akuntan (PPA) dikarenakan untuk menjadi seorang partner

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berwenang menandatangani audit report, seorang auditor wajib memiliki nomor register negara akuntan (Registered Accountant) (Arif, 2018).

2. Pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing.

   Dengan ikut berpartisipasi dan menyelesaikan pelatihan auditor dan dengan mendapatkan pengalaman maka auditor akan memiliki pengetahuan yang berkembang dalam bidang audit masing-masing (Arif, 2018).

3. Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor. Pelatihan sangat dibutuhkan menimbang dalam pernyataan yang ada di standar umum bahwa auditor secara bersamaan harus mempunyai kecakapan professional yang mumpuni untuk mengerjakan tugas pemeriksaan.

Kecakapan tersebut dikembangkan dan dipelihara dengan Pendidikan profesional berkelanjutan (Arif, 2018). Pengetahuan yang harus dimiliki auditor secara umum ada lima (Putri, 2016), yaitu:

1. Pengetahuan Pengauditan Umum

   Pengetahuan pengauditan umum seperti resiko audit, prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh di perguruan tinggi, Sebagian dari pelatihan dan pengalaman.

2. Pengetahuan Area Fungsional

   Untuk area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan dengan komputer Sebagian didapatkan dari pendidikan Pendidikan formal perguruan tinggi, Sebagian besar dari pelatihan dan pengalaman.

etahuan Mengenai Isu-isu Akuntansi yang Paling Terbaru

or bisa mendapatkannya dari pelatihan professional yang enggarakan secara berkelanjutan.

4. Pengetahuan Mengenai Industri Khusus

   Pengetahuan mengenai industry khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

5. Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Selain itu, menilik dari tahapannya, kompetensi profesional terbagi menjadi dua fase terpisah (Rahayu & Ely (2010:226) dalam Putri (2016), yaitu:

1. Pencapaian Kompetensi Profesional

   Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar Pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh Pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja, hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

2. Pemeliharaan Kompetensi Profesional

   a) Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.

   b) Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.

   c) Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional."

Bedasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, pengetahuan dan keahlian perlu diraih dan dipelihara untuk menunjang kompetensi. Kompetensi dalam ɐksi adalah implementasi sikap dan perilaku etis, serta kemampuan ɯikasi seorang auditor yang direfleksikan dengan prinsip-prinsip dari

Optimized using
trial version
www.balesio.com

etika seorang auditor (Arif, 2018). Adapaun 5 prinsip etika berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik tersebut adalah:

1. Integritas Auditor bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
2. Objektivitas tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
   a. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   b. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
4. Kerahasiaan menjaga informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
5. Perilaku profesional mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh anggota mungkin akan mendikreditkan profesi anggota".

Kompetensi dalam ranah prikomotorik yaitu keterampilan teknis juga memiliki implementasi yang sesungguhnya (Arif, 2018). Implementasi keterampilan teknis menurut Agoes (2013) dalam Arif (2018) adalah:

1. Penugasan teknologi informasi (computer)

audit

oat disimpulkan bahwa kompetensi auditor meliputi tiga ranah yaitu afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif meliputi pengetahuan auditor,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ranah afektif meliputi sikap dan kemampuan auditor sedangkan ranah psikomotorik meliputi keterampilan implementasi oleh auditor.

2.1.2.4 Indikator Kompetensi Auditor

Indikator kompetensi auditor dapat dijabarkan sebagai berikut (Pintasari, 2015):

1. Pengetahuan akan prinsip akuntansi dan standar auditing.

   Hal ini berkaitan dengan pengetahuan auditor akan prinsip akuntansi dan standar auditing yang nanti akan menunjang auditor ketika auditor melakukan proses audit.

2. Pengetahuan tentang jenis industry klien.

   Pengetahuan auditor akan industry klien yang dihadapi sangat penting agar mengetahui seberapa besar kompetensi seorang auditor.

3. Pendidikan formal yang sudah ditempuh.

   Pendidikan formal menjadi syarat utama yang harus dimiliki seorang auditor sebagai basic untuk melakukan tugas audit.

4. Pelatihan, kursus, dan keahlian khusus yang dimiliki.

   Auditor dituntut agar mempunyai keahlian khusus agar dapat meningkatkan kepercayaan klien.

5. Jumlah klien yang sudah diaudit.

   Jumlah klien yang sudah diaudit oleh seorang auditor dapat menjadi tolak ukur pengalaman, karena semakin banyak jumlah klien yang diaudit maka seorang auditor memiliki banyak pengalaman.

6. Pengalaman dalam melakukan audit

   Pengalaman auditor dalam melaksanakan proses audit menjadi faktor yang

   lah penting untuik mengukur kompetensi seorang auditor.

   perusahaan yang pernah diaudit

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pengalaman auditor juga dapat dilihat dari jenis perusahaan yang pernah diaudit, karena semakin banyak jenis perusahaan yang pernah diaudit oleh auditor maka keahlian auditor juga akan meningkat.

Dapat disimpulkan bahwa indikator kompetensi auditor dapat dilihat dari pengetahuan audit akan prinsip, standar audit, dan jenis industri klien; pendidikan formal yang sudah ditempuh oleh audit; pelatihan, kursus dan keahlian khusus yang dimiliki; jumlah klien yang pernah diaudit; pengalaman melakukan proses audit; dan jenis perusahaan yang pernah diaudit.

2.1.3. Efektifitas Auditing

2.1.3.1. Pengertian Auditing

Menurut Thian (2021:9) audit merupakan suatu siklus yang tepat untuk memperoleh dan mengevaluasi (tidak memihak) bukti yang terkait dengan pernyataan kegiatan dan peristiwa ekonomi, untuk memutuskan tingkat konsistensi antara pernyataan dan standar yang ditetapkan, dan menyampaikan hasil kepada individu yang terlibat. Menurut (Agoes 2017:4), yang dimaksud dengan pengertian audit adalah penilaian yang dilakukan secara mendasar dan metodis oleh pihak yang bebas atas penyelenggaraan suatu perusahaan yang memuat laporan keuangan dan catatan pembukuan serta bukti pendukung lainnya, untuk membingkai penilaian atas kecukupan ulasan ringkasan anggaran perusahaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Rahmat dan Abdul (2020:11) audit adalah tindakan melihat bukti-bukti yang berhubungan dengan data yang dikumpulkan oleh dewan yang telah diisi ikhtisar fiskal. Sedangkan menurut (Priyadi, 2020:4) audit adalah pemilihan dan penilaian bukti mengenai data untuk

‘ kan dan melaporkan tingkat kesamaan antara data dan aturan yang n. Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit adalah cara yang efektif endapatkan dan menilai bukti secara objektif sehubungan dengan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian keuangan, ditentukan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan ini dan standar yang ditetapkan, dan memberikan hasil kepada klien yang tertarik.

Sebagaimana dinyatakan oleh Rahmat dan Abdul (2020:11) audit adalah tindakan melihat bukti-bukti yang berhubungan dengan data yang dikumpulkan oleh dewan yang telah diisi ikhtisar fiskal. Sedangkan menurut (Priyadi, 2020:4) audit adalah pemilihan dan penilaian bukti mengenai data untuk memutuskan dan melaporkan tingkat kesamaan antara data dan aturan yang ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit adalah cara yang efektif untuk mendapatkan dan menilai bukti secara objektif sehubungan dengan pernyataan tentang kegiatan dan kejadian keuangan, ditentukan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan ini dan standar yang ditetapkan, dan memberikan hasil kepada klien yang tertarik.

Efektivitas proses audit mengacu pada seberapa baik proses audit dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu memberikan jaminan atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efisiensi serta efektivitas operasi. Menurut Sawyer (2003), efektivitas audit internal dapat diukur melalui kontribusi audit terhadap perbaikan kontrol internal, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola. Efektivitas proses audit mengacu pada seberapa baik proses audit dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu memberikan jaminan atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efisiensi serta efektivitas operasi. Menurut Sawyer (2003), efektivitas audit internal dapat diukur melalui kontribusi audit terhadap perbaikan kontrol internal, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Jenis-Jenis Audit

ırut Thian (2021:12) audit terbagi menjadi 5 jenis yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan

   Audit Laporan Keuangan dilakukan untuk memutuskan apakah ringkasan fiskal klien secara umum sesuai dengan norma pembukuan yang relevan. Laporan Keuangan yang dievaluasi umumnya menggabungkan pernyataan posisi moneter, pernyataan pembayaran menyeluruh, pernyataan perubahan nilai, dan pernyataan pendapatan, termasuk garis besar strategi pembukuan dan data logis lainnya.

2. Audit Pengendalian Internal

   Audit Pengendalian Internal dipimpin untuk memberikan penilaian tentang kelangsungan kontrol dalam klien. Karena target dan kewajiban yang saling terkait dalam melakukan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan, norma pemeriksaan untuk perusahaan publik memerlukan audit terpadu dari pengendalian internal dan laporan keuangan.

3. Audit Ketaatan

   Audit Ketaatan dilakukan untuk memutuskan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah telah sesuai dengan substansi yang dievaluasi.

4. Audit Operasional

   Audit Operasional dilakukan untuk me-review (secara metodis) sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk menilai apakah aset yang dapat diakses telah digunakan dengan efektif dan efisien. Hasil akhir dari Audit Operasional adalah sebagai saran kepada manajemen sehubungan dengan perbaikan operasi.

5. Audit Forensik

   udit Forensik diarahkan untuk mengenali atau mencegah tindakan . Pemanfaatan pemeriksa untuk melakukan audit forensik telah mbang secara mendasar akhir-akhir ini.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.1.3.3. Elemen Audit

Terdapat tiga elemen audit menurut Junaidi & Nurdiono (2016:4) yaitu:

1. Auditor dalam menyelesaikan penilaian harus bebas dan objektif.
2. Auditor harus memiliki bukti yang cukup untuk membantu sudut pandangnya tentang kesopanan laporan fiskal klien. Pembuktian dapat diperoleh melalui persepsi, penilaian, penanganan dan penegasan yang objektif.
3. Auditor harus menyajikan efek samping dari pekerjaannya sebagai ulasan. laporan review digunakan untuk menyampaikan hasil review kepada pihak yang memanfaatkan data ikhtisar fiskal.

2.1.4. Sistem Pengendalian Internal

2.1.4.1. Pengertian

Menurut Eko Sudarmanto (2021:234) pengendalian internal adalah suatu kerangka dan alat yang direncanakan sedemikian rupa oleh para pelaksana untuk menjamin tujuan yang ingin dicapai berjalan secara ideal dan menjauhi kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (*COSO), pengendalian internal melibatkan lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan serta kesalahan, dan memastikan bahwa aktivitas bisnis dilakukan dengan cara yang teratur dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Menurut Mulyadi (2016:4), sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2014:3), sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Menurut Azhar Susanto (2013:22), sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Menurut Hery (2013:159), pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Definisi Sistem Pengendalian Internal Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),* Sistem Pengendalian Internal sebagai suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel suatu organisasi. Proses ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian tujuan-tujuan operasional, efisiensi dan efektivitas operasi, pelaporan keuangan yang handal, dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA} bahwa* Sistem Pengendalian Internal sebagai rangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai

i pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam hal efisiensi dan efektivitas
nal, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan
akan yang berlaku.

2.1.4.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2016:163) tujuan sistem pengendalian internal adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi.

   Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

   Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. Mendorong efisiensi.

   Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efesien.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

   ntuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen metapkan kebijakan dan
   lur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar, hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaam lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

2.1.4.3. Komponen Pengendalian Intern

Menurut Hery (2013), pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan. Kelima komponen pengendalian intern tersebut yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

   Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) adalah suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan suatu pengendalian sikap orangnya. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang bersifat disiplin dan terstruktur. Terdapat 5 faktor penting untuk suatu lingkungan pengendalian, diantaranya yaitu:

   a. Komitmen pada integritas dan nilai etika Integritas dan nilai-nilai etika merupakan produk dari standar etika dan sikap sebuah entitas, sebagaimana dengan seberapa baik hal tersebut dikomunikasikan dan diterapkan dalam praktiknya. Integritas dan nilai-nilai etika mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi insentif dan godaan yang dapat mendorongpersonel untuk terlibat dalam perilaku yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Filosofi dan gaya operasi manajemen Manajemen, melalui aktivias-aktivitas yang dilakukannya, memberikan sinyal yang sangat jelas kepada karyawan mengenai signifikasi pengendalian intern.

c. Struktur organisasi Struktur organisasi suatu entitas mendefinisikan jalur tanggung jawab dan otoritas yang ada. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen-elemen fungsional bisnis serta persepsi mengenai bagaimana pengendalian intern diterapkan.

d. Komite audit membantu dewan dalam melakukan pengawasan, dewan membentuk komite audit dengan tanggung jawab untuk melakukann pengawasan terhadap pelaporan keuangan Komite audit juga bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi yang telah berjalan dengan internal auditor maupun eksternal auditor. Hal itu memungkinkan auditor dan direksi untuk membahas hal-hal yang mungkin terkait dengan sesuatu seperti integritas atau tindakan manajemen.

e. Praktik dan kebijakan mengenai sumber daya manusia aspek pengendalian internal yang paling penting adalah personel. Karyawan yang tidak kompeten atau tidak jujur dapat merusak sistem, meskipun ada banyak pengendalian yang diterapkan. Karyawan yang jujur dan kompeten mampu mencapai kinerja yang tinggi meskipun hanya ada sedikit pengendalian. Akan tetapi, karyawan yang jujur dan kompeten bisa juga dapat terganggu kinerjanya sebagai akibat dari perasan bosan, tidak puas, ataupun masalah pribadi lainnya. Karena pentingnya sumber daya manusia bagi keberhasilan sebuah entitas (pengendalian), metode atau bijakan untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih, mempromosikan, n memberi kompensasi kepada karyawan merupakan bagian yang nting dari pengendalian intern.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Penilaian Resiko

Penilaian Resiko (*Risk Assessment*) adalah suatu kebijakan dan prosedur yang bisa membantu perusahaan dalam meyakinkan tugas dan perintah yang diberikan manajemen telah dijalankan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas Pengendalian (*Control Activities)* adalah suatu kebijakan dan prosedur yang membantu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan manajemen telah dilaksanakan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*) adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu menjalankan tanggung jawabnya.

5. Pengawasan / Pemantauan (Monitoring)

Adalah suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada waktu tertentu. Pemantauan ini melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan.

2.1.4.4. Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur sistem pengendalian intern suatu pengendalian intern yang baik perlu adanya unsur-unsur yang berhubungan langsung dengan pengendalian, sehingga tujuan dari pengendalian intern dapat tercapai. Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi menurut Mulyadi (2016:164) antara lain:

tur organisasi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Struktur organisasi merupakan kerangka pemisahan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatankegiatan pokok perusahaan. Pemisahan tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi dilakukan untuk membagi berbagai tahapan transaksi kepada unit organisasi yang lain sehingga semua tahapan transaksi tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja. Struktur organisasi yang dapat memisahkan fungsi-fungsi ini diharapkan dapat mencegah kecurangan-kecurangan dalam perusahaan.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

   Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dalam suatu perusahaan merupakan suatu alat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi yang terjadi.

3. Praktik yang sehat

   Setiap pegawai di dalam suatu perusahaan melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, jika penyusunan struktur organisasi dan perancangan arus prosedur sudah merupakan suatu rencana yang strategis maka diperlukan adanya praktik-praktik yang sehat yang merupakan alat taktis untuk tercapainya suatu rencana.

4. Karyawan yang cakap

   Karyawan yang cakap merupakan salah satu unsur sistem pengendalian intern yang paling penting bagi perusahaan karena keberhasilan perusahaan secara keseluruhan tergantung pada prestasi dan sikap karyawan. Untuk itu, penyeleksian terhadap karayawan harus benar-benar dilaksanakan supaya mendapatkan karyawan yang berkualitas dan bisa berprestasi, yaitu melalui dur pengujian yang ketat, pengukuran prestasi atas tanggung jawab diberikan serta pendidikan dan pelatihan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.1.4.5. Indikator Pengendalian Internal

Indikator Pengendalian Internal menurut Mahmudi (2016:21) adalah:

1. Lingkungan pengendalian

   Lingkungan Pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan.

2. Penaksiran risiko

   Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang (iteratif) untuk mengenali (identifikasi) dan menilai (analisis) risiko atas pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

3. Aktivitas Pengendalian

   Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur (misalnya prosedur operasi standar atau SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.

4. Informasi dan komunikasi

   Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus 10 memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi aimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

5. Pemantauan

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

Selanjutnya unsur-unsur Pengendalian Internal menurut Mulyadi (2017:130) ada 4 unsur, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

aktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Dari kedua indikator di atas, penulis akan menggunakan indikator Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.

2.1.5. Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

2.1.5.1. Pengertian

Kinerja APIP merujuk pada kemampuan unit pengawasan internal pemerintah untuk melakukan tugas pengawasan, audit, dan evaluasi secara efektif. Kinerja ini mencakup kualitas audit yang dilakukan, kecepatan dalam menyelesaikan audit, serta dampak rekomendasi audit terhadap perbaikan proses dan kontrol internal. Menurut Behn (2003), pengukuran kinerja di sektor publik harus mencakup efektivitas (mencapai tujuan), efisiensi (menggunakan sumber daya dengan baik), dan kepuasan stakeholder.

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Kinerja atas penyelenggaraan [illegible]si pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui [illegible]engawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan aparatur pemerintah yang berwenang melakukan fungsi sistem pengawasan internal. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegaiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. APIP yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu aparatur pemerintah daerah yang bekerja di lembaga pemerintah yang disebut dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang didanai dengan APBD.

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui:

a. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Adapun audit yang dimaksud antara lain:

it Kinerja

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

2. Audit dengan tujuan tertentu

Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.

b. Review merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau aturan yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana atau aturan yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dana konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh APIP yaitu:

a. Pemeriksaan rutin (reguler) yang dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan.

b. Pemeriksaan khusus dan kasus yang dilaksanakan berdasarkan permintaan pejabat berwenang terkait permohonan dan atau adanya pengaduan perseorangan atau masyarakat.

dasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Aparatur Pengawas Pemerintah (APIP) memiliki peran dan posisi yang sangat strategis ewujudkan akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran penting dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas di sektor publik. Berikut adalah beberapa pendapat ahli tentang kinerja APIP:

1. Haryadi dan Suwardi (2019):

   Kinerja APIP sangat dipengaruhi oleh kompetensi auditor dan kualitas audit. Auditor yang memiliki kompetensi tinggi cenderung menghasilkan audit yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja APIP secara keseluruhan. Selain itu, dukungan dari manajemen puncak juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja APIP.

2. Supriyadi dan Rosnidah (2020):

   Kinerja APIP dapat dilihat dari tiga aspek utama: efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas audit internal yang dilakukan oleh APIP sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Mardiasmo (2018):

   Kinerja APIP harus diukur berdasarkan kemampuan mereka dalam memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dan meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah. Kinerja APIP yang baik tercermin dari penurunan tingkat kecurangan dan peningkatan efisiensi operasional di instansi pemerintah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

› (2017):

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kinerja dapat diukur melalui indikator seperti jumlah temuan audit, persentase

rekomendasi yang ditindaklanjuti, dan tingkat kepuasan dari instansi yang diaudit. BPKP juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi auditor internal untuk memastikan mereka selalu update dengan standar audit terbaru.

5. Rivai dan Basri (2020):

   Menyoroti pentingnya integritas dan independensi auditor dalam meningkatkan kinerja APIP. Auditor yang independen dan memiliki integritas tinggi cenderung lebih mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi yang objektif. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses audit juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja APIP.

2.2. Tinjauan Empiris

Berikut adalah tabel berisi 10 tinjauan empiris penelitian terkait analisis pengaruh kompetensi auditor dan efektivitas proses audit yang dimediasi oleh sistem pengendalian internal terhadap kinerja aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat:

Tabel 2.1 Penelitian Terkait Analisis Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Efektivitas Proses Audit

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari (2018)	Pengaruh Kompetensi Auditor dan Efektivitas Proses Audit terhadap Kinerja Auditor Internal dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening	Kompetensi Auditor, Efektivitas Proses Audit, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Auditor	Kuantitatif, Analisis Regresi	Kompetensi auditor dan efektivitas proses audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel mediasi
	awati	Pengaruh	Kompetensi	Kuantitatif,	Kompetensi auditor

Optimized using trial version www.balesio.com

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(2017)	Kompetensi Auditor dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Auditor, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja APIP	SEM	dan sistem pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi kinerja APIP
3	Setiawan (2019)	Analisis Pengaruh Efektivitas Proses Audit terhadap Kinerja Auditor Pemerintah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Mediasi	Efektivitas Proses Audit, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Auditor	Kuantitatif, Path Analysis	Efektivitas proses audit memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja auditor melalui sistem pengendalian internal
4	Nugroho (2020)	Peran Kompetensi Auditor dalam Meningkatkan Kinerja Audit Pemerintah: Studi pada Inspektorat Daerah	Kompetensi Auditor, Kinerja Audit Pemerintah	Kuantitatif, Analisis Regresi	Kompetensi auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja audit pemerintah
5	Dewi (2016)	Pengaruh Efektivitas Proses Audit terhadap Kualitas Audit dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Mediasi	Efektivitas Proses Audit, Kualitas Audit, Sistem Pengendalian Internal	Kuantitatif, SEM	Efektivitas proses audit meningkatkan kualitas audit melalui penguatan sistem pengendalian internal
	at)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor Pemerintah Daerah	Kompetensi Auditor, Independensi Auditor, Kinerja Auditor	Kuantitatif, PLS-SEM	Kompetensi dan independensi auditor secara signifikan meningkatkan kinerja auditor pemerintah daerah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Hikmatul Razila (2020)	PENGARUH PERAN, KINERJA DAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	Kinerja dan Kompetensi Auditor	Kuantitatif, Analisis Regresi	Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan secara parsial variabel peran dan kompetensi auditor internal berpengaruh sementara variabel kinerja tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal
8	Yuliani (2019)	Analisis Pengaruh Kompetensi dan Etika Auditor terhadap Efektivitas Audit pada Inspektorat	Kompetensi Auditor, Etika Auditor, Efektivitas Audit	Kuantitatif, SEM	Kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit
9	Prasetyo (2020)	Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan	Pengendalian Internal, Kompetensi, Kinerja Auditor	Kuantitatif, PLS-SEM	Pengendalian internal dan kompetensi secara signifikan mempengaruhi kinerja auditor
		Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kinerja Auditor dengan Moderasi	Efektivitas Pengendalian Internal, Kompetensi, Kinerja Auditor	Kuantitatif, Moderated Regression Analysis	Efektivitas pengendalian internal meningkatkan kinerja auditor, dengan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Kompetensi			kompetensi sebagai moderator
11	Purnomo, H., & Yudianto, I. (2019)	Pengaruh Temuan Audit BPK, Opini Audit dan Kapasitas APIP terhadap Indeks Kinerja Pemerintah Daerah	Temuan Audit BPK, Kapasitas APIP, Indeks Kinerja Pemerintah Daerah	Kuantitatif, Regresi Linier	Banyak temuan BPK yang berulang disebabkan oleh **rendahnya kapabilitas APIP** dalam melakukan audit internal dan tindak lanjut. Kinerja APIP yang rendah memperlemah kemampuan pengawasan sehingga daerah kesulitan memperbaiki opini dan mengurangi temuan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com